

KEBEbasan BERPENDAPAT DI LINGKUNGAN PERUMAHAN MODERN INDONESIA

Muhammad Abdiel Abrar¹, Muhammad Naufal Atha Al Khairi², Raihan Guntur
Ramadhan³, Firman Agus Budiono⁴, Mochammad Pasha Suryatama⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Telkom

(abdielabrar@student.telkomuniversity.ac.id¹, athaanfl@student.telkomuniversity.ac.id²,
raihang@student.telkomuniversity.ac.id³, firmanab@student.telkomuniversity.ac.id⁴,
ssompashas@student.telkomuniversity.ac.id⁵)

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada praktik kebebasan berpendapat di lingkungan perumahan modern di Indonesia, khususnya dalam relasi antara warga tetap dan penyewa. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam, penelitian ini menggali pengalaman sehari-hari warga dalam mengakses informasi, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kegiatan komunal. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan antara warga tetap dan penyewa, terutama dalam hal akses terhadap informasi penting yang berkaitan dengan lingkungan perumahan. Salah satu temuan utama adalah praktik gatekeeping informasi melalui grup WhatsApp utama perumahan yang hanya diikuti oleh warga tetap. Penyewa sering kali tidak diikutsertakan, sehingga mereka tertinggal informasi mengenai rapat warga, kegiatan sosial, maupun kebijakan internal perumahan. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat partisipasi penyewa serta munculnya rasa keterasingan dari komunitas. Kebebasan berpendapat secara formal memang tidak dibatasi, namun secara struktural tidak difasilitasi secara setara. Hambatan ini semakin diperkuat oleh minimnya interaksi sosial antarwarga serta desain perumahan cluster yang cenderung individualis dan tertutup. Ruang-ruang perjumpaan sosial yang terbatas membuat komunikasi informal sulit terbangun. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat tidak cukup dimaknai sebagai ketiadaan larangan, tetapi juga membutuhkan struktur komunikasi yang inklusif dan adil. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan pengembangan mekanisme komunikasi yang lebih terbuka agar seluruh warga, baik tetap maupun penyewa, dapat terlibat aktif dalam kehidupan komunal perumahan.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat; Perumahan Modern; Partisipasi Warga; Gatekeeping; Komunikasi.



Copyright (c) 2025. Muhammad Abdiel Abrar, Muhammad Naufal Atha Al Khairi, Raihan Guntur Ramadhan, Firman Agus Budiono, Mochammad Pasha Suryatama. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstract

This study explores how freedom of expression is practiced within modern residential areas in Indonesia, focusing on the social dynamics between permanent residents and temporary renters. Using in-depth interviews as the primary method, the research captures everyday experiences related to communication, information access, and participation in neighborhood life. The findings reveal a clear information gap between these two groups, largely driven by the exclusion of renters from the main residential WhatsApp group that functions as the central communication channel. This form of information gatekeeping results in renters having limited knowledge about neighborhood meetings, community rules, social events, and collective decision-making processes. As a consequence, renters often feel disconnected and are less likely to participate in communal activities, reinforcing their marginal position within the residential environment. Although there are no explicit prohibitions against renters expressing their opinions, the lack of access to communication platforms effectively silences their voices. These challenges are compounded by minimal face-to-face interaction among residents and the physical design of cluster housing, which emphasizes privacy, boundaries, and individual ownership over shared social spaces. Such environments reduce opportunities for spontaneous interaction and dialogue, further weakening social cohesion. The study concludes that freedom of expression should not be understood merely as the absence of formal restrictions, but as a condition that requires inclusive and accessible communication structures. Therefore, the findings underscore the importance of developing more open and participatory communication mechanisms to ensure that all residents, regardless of their residential status, can engage meaningfully in community life.

Keywords: Freedom Of Expression; Residential Area; Community Participation; Gatekeeping; Communication.

A. Pendahuluan

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang secara tegas dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya. Hak ini menjadi fondasi penting bagi kehidupan demokratis, karena memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam proses sosial dan pengambilan keputusan bersama. Namun demikian, implementasi kebebasan berpendapat dalam kehidupan

sehari-hari tidak selalu berjalan optimal, terutama di ruang sosial berskala kecil seperti lingkungan perumahan.

Dalam konteks perumahan modern di Indonesia, khususnya yang mengadopsi konsep cluster dan gated community, kebebasan berpendapat sering kali menghadapi tantangan struktural. Desain perumahan yang menekankan keamanan, privasi, dan eksklusivitas secara tidak langsung membentuk pola interaksi sosial yang tertutup dan terbatas. Akibatnya, relasi



antarwarga menjadi kurang spontan dan lebih formal, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan dan modal sosial dalam komunitas (Yandi, 2015). Kondisi ini sejalan dengan temuan Low (2003) yang menyatakan bahwa gated communities cenderung menciptakan segregasi sosial dan mempersempit ruang dialog publik.

Lebih lanjut, Putnam (2000) menjelaskan bahwa rendahnya modal sosial berimplikasi pada melemahnya partisipasi sipil, termasuk keberanian dan kesempatan warga untuk menyampaikan pendapatnya. Dalam lingkungan perumahan modern, kebebasan berpendapat sering kali tidak dibatasi secara hukum, tetapi tereduksi melalui mekanisme sosial, seperti eksklusi komunikasi, dominasi kelompok tertentu, dan minimnya ruang pertemuan bersama. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat perlu dipahami tidak hanya sebagai ketiadaan larangan, tetapi juga sebagai keberadaan struktur sosial dan komunikasi yang inklusif. Penguatan ruang interaksi dan mekanisme komunikasi yang terbuka menjadi kunci untuk mendorong partisipasi dan ekspresi warga secara setara di lingkungan perumahan modern.

Penelitian di bidang kajian urban dan perumahan menegaskan bahwa desain ruang fisik memiliki peran penting dalam membentuk pola komunikasi, interaksi sosial, dan kohesi antar

penghuni. Tata ruang yang dirancang secara eksklusif, seperti pada perumahan cluster dan gated community, cenderung membatasi ruang temu bersama dan mengurangi frekuensi interaksi informal antarwarga. Kondisi ini berdampak pada lemahnya keterikatan komunal serta menurunnya rasa memiliki terhadap lingkungan sosial (Dewi, Wiranegara, & Supriyatna, 2024).

Kajian Gehl (2011) menunjukkan bahwa ruang publik yang ramah pejalan kaki dan mendorong aktivitas bersama berkontribusi pada meningkatnya komunikasi sosial dan kualitas kehidupan perkotaan. Sebaliknya, lingkungan hunian yang menekankan segregasi ruang dan privatisasi berlebihan berpotensi menciptakan jarak sosial antar penghuni. Temuan ini diperkuat oleh Low (2003) yang menyatakan bahwa desain perumahan tertutup dapat menghambat dialog dan partisipasi warga dalam kehidupan komunitas. Dengan demikian, desain ruang tidak bersifat netral, melainkan turut menentukan sejauh mana interaksi sosial dan kohesi komunal dapat berkembang secara berkelanjutan.

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam kajian internasional yang menegaskan bahwa desain urban memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat modal sosial dan kemampuan warga untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Laporan riset urban yang dilakukan oleh peneliti di Griffith



University (2024) menunjukkan bahwa lingkungan hunian dengan ruang publik yang terbuka, mudah diakses, dan mendorong pertemuan sosial cenderung menghasilkan tingkat kepercayaan, kolaborasi, serta partisipasi warga yang lebih tinggi. Sebaliknya, desain kawasan yang terfragmentasi dan eksklusif berkontribusi pada menurunnya interaksi sosial dan melemahnya keterlibatan sipil.

Kajian ini sejalan dengan penelitian Putnam (2000) yang menegaskan bahwa modal sosial tumbuh melalui interaksi rutin dalam ruang bersama. Selain itu, Gehl (2011) menekankan bahwa kualitas desain ruang publik berpengaruh langsung terhadap intensitas aktivitas sosial dan dialog antarwarga. Dengan demikian, desain urban tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga membentuk kapasitas sosial warga untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan publik secara demokratis.

Selain faktor fisik, status sosial penghuni turut memengaruhi dinamika kebebasan berpendapat. Perumahan modern sering ditempati oleh dua kelompok utama: pemilik rumah dan penyewa. Studi tentang modal sosial menemukan bahwa pemilik rumah memiliki partisipasi komunitas yang lebih tinggi karena mereka lebih memiliki komitmen jangka panjang terhadap lingkungan tempat tinggalnya (Akbar, Hartono, & Aritenang, 2023). Sebaliknya,

penyewa sering dipandang sebagai penghuni sementara, sehingga akses mereka terhadap informasi, ruang komunikasi, serta kesempatan untuk menyampaikan pendapat sering kali lebih terbatas (Guity-Zapata, Stone, & Nygaard, 2024).

Literatur lain juga menyoroti bahwa penyewa memiliki tingkat kohesi sosial dan keterikatan komunitas yang lebih rendah, terutama ketika mereka tidak diikutsertakan dalam saluran komunikasi resmi (Rinawati et al., 2017). Ketimpangan akses informasi ini dapat menciptakan praktik *gatekeeping* yang menempatkan penyewa pada posisi marjinal dalam proses pengambilan keputusan, meskipun tidak ada larangan formal terkait kebebasan berpendapat.

Meskipun terdapat berbagai penelitian mengenai modal sosial, desain perumahan, dan perbedaan status penghuni, kajian yang secara khusus membahas bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi kebebasan berpendapat dalam komunitas perumahan Indonesia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana struktur komunikasi internal, desain ruang, dan hubungan sosial antarwarga membentuk peluang serta hambatan terhadap kebebasan berpendapat di Perumahan Pesona Bali.



B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena kebebasan berpendapat secara mendalam dalam konteks sosial yang spesifik. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif, dinamika komunikasi, serta kondisi ruang dan relasi sosial yang tidak dapat diukur secara numerik (Creswell, 2014). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu lokasi, sehingga memungkinkan eksplorasi fenomena secara komprehensif dan kontekstual.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumen internal perumahan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik komunikasi, interaksi sosial, serta dinamika kebebasan berpendapat di lingkungan perumahan modern. Penggunaan lebih dari satu teknik pengumpulan data juga bertujuan untuk meningkatkan validitas temuan melalui triangulasi data (Denzin, 2012).

Observasi lapangan digunakan untuk mengamati secara langsung pola interaksi sehari-hari antar penghuni, intensitas penggunaan ruang komunal, serta bentuk-bentuk komunikasi informal yang berkembang di lingkungan perumahan. Melalui observasi, peneliti

dapat menangkap perilaku sosial yang sering kali tidak terungkap dalam wawancara, seperti kecenderungan pengelompokan sosial atau minimnya interaksi antar kategori penghuni. Teknik ini relevan untuk memahami konteks sosial secara alami dan apa adanya.

Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan keseimbangan antara struktur dan fleksibilitas. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman subjektif informan secara lebih mendalam, sambil tetap menjaga fokus pada isu penelitian yang telah dirumuskan (Kvale & Brinkmann, 2009). Informan dalam penelitian ini mencakup berbagai kategori penghuni, seperti pemilik rumah dan penyewa, sehingga perspektif yang diperoleh lebih beragam dan representatif. Selain itu, analisis dokumen internal perumahan, seperti aturan warga dan media komunikasi resmi, digunakan untuk memahami kerangka normatif yang memengaruhi praktik komunikasi dan partisipasi warga. Kombinasi ketiga teknik ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai dinamika kebebasan berpendapat di lingkungan perumahan modern.

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai materi tertulis dan digital yang berkaitan dengan tata kelola perumahan, meliputi aturan internal, struktur organisasi warga, serta rekaman alur komunikasi digital



seperti grup WhatsApp lingkungan. Analisis dokumen dipilih karena mampu memberikan pemahaman mengenai kerangka formal dan semi-formal yang mengatur kehidupan sosial warga, terutama dalam hal distribusi informasi dan mekanisme penyampaian pendapat. Dokumen tidak hanya dipahami sebagai sumber data pelengkap, tetapi sebagai artefak sosial yang merefleksikan relasi kekuasaan dan praktik komunikasi dalam komunitas (Bowen, 2009).

Melalui penelaahan aturan internal perumahan, penelitian ini mengidentifikasi norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban warga, termasuk siapa yang dianggap sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi warga dianalisis untuk melihat pola hierarki, peran pengurus, serta jalur formal aspirasi. Sementara itu, analisis komunikasi digital—khususnya grup WhatsApp—memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana informasi disebarluaskan, siapa yang memiliki akses, dan sejauh mana ruang dialog dibuka bagi seluruh penghuni. Media komunikasi digital kerap berfungsi sebagai ruang publik baru di tingkat lokal, yang sekaligus dapat menjadi sarana inklusi maupun eksklusi sosial (Treem & Leonardi, 2012).

Pendekatan analisis dokumen ini sejalan dengan kajian Prior (2003) yang menekankan bahwa dokumen

institutional membentuk dan membatasi praktik sosial. Dengan demikian, analisis dokumen membantu mengungkap bagaimana kebebasan berpendapat di lingkungan perumahan tidak hanya ditentukan oleh sikap individu, tetapi juga oleh struktur komunikasi dan aturan yang mengatur akses serta partisipasi warga.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik mengikuti prosedur yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006). Tahapan analisis mencakup proses pengkodean awal, identifikasi kategori, penyusunan tema, serta interpretasi mendalam terhadap makna data. Metode ini memungkinkan peneliti mengungkap pola, ketidakseimbangan persepsi, dan struktur sosial yang memengaruhi kebebasan berpendapat. Untuk meningkatkan validitas penelitian, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian ini memberikan landasan analitis yang kuat untuk memahami dinamika kebebasan berpendapat di lingkungan perumahan modern Indonesia. Dengan mengombinasikan observasi lapangan, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, penelitian ini mampu menangkap keterkaitan antara desain fisik perumahan, struktur komunikasi internal, serta pola interaksi sosial warga secara



komprehensif. Pendekatan kualitatif semacam ini memungkinkan peneliti melihat kebebasan berpendapat tidak hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai praktik sosial yang dibentuk oleh konteks ruang dan institusi lokal.

Kajian urban menunjukkan bahwa desain fisik perumahan—seperti tata letak *cluster*, keberadaan pagar, dan keterbatasan ruang komunal—berpengaruh langsung terhadap intensitas interaksi sosial dan peluang dialog antarwarga (Low, 2003; Gehl, 2011). Di sisi lain, struktur komunikasi internal, baik formal melalui organisasi warga maupun informal melalui media digital, berperan sebagai medium utama penyaluran informasi dan aspirasi. Struktur komunikasi yang hierarkis dan eksklusif berpotensi membatasi partisipasi kelompok tertentu, sehingga kebebasan berpendapat tereduksi secara struktural (Habermas, 1989).

Selain itu, interaksi sosial sehari-hari menjadi arena penting tempat kebebasan berpendapat dijalankan atau justru dibatasi. Putnam (2000) menegaskan bahwa modal sosial yang kuat mendorong partisipasi dan keberanian warga untuk bersuara dalam ruang publik. Dengan demikian, pendekatan metodologis ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana faktor spasial, institusional, dan sosial saling berkelindan dalam membentuk praktik kebebasan berpendapat. Temuan

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan model perumahan yang lebih inklusif, partisipatif, dan demokratis di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kebebasan berpendapat di Perumahan Pesona Bali dipengaruhi oleh struktur komunikasi internal dan hubungan sosial antarwarga. Meskipun tidak terdapat larangan eksplisit dalam bentuk aturan tertulis terkait penyampaian pendapat, hambatan tetap muncul melalui mekanisme komunikasi yang tidak setara antara warga tetap dan penyewa. Penyewa yang sebagian besar merupakan mahasiswa tidak dilibatkan dalam grup WhatsApp utama perumahan yang berfungsi sebagai saluran komunikasi inti. Keputusan ini didasarkan pada anggapan bahwa penyewa merupakan penghuni sementara dan bahwa urusan lingkungan lebih relevan bagi pemilik rumah dibandingkan bagi penyewa.

Kondisi tersebut menyebabkan praktik *gatekeeping* dalam pengelolaan informasi, di mana pemilik rumah menjadi perantara bagi penyampaian pendapat penyewa. Praktik ini menciptakan jarak komunikasi yang cukup signifikan dan berpengaruh langsung pada rendahnya tingkat partisipasi penyewa dalam kegiatan komunal. Selain itu, minimnya interaksi sosial antara penyewa dan warga tetap



membuat ruang dialog yang diperlukan bagi terciptanya kebebasan berpendapat tidak berkembang secara optimal.

Hasil Temuan Lapangan :

1. Akses Informasi

Akses informasi yang tidak merata menjadi salah satu kendala utama dalam kebebasan berpendapat bagi penyewa di lingkungan perumahan modern. Ketidakikutsertaan penyewa dalam grup WhatsApp utama perumahan membuat mereka tidak menerima informasi secara simultan dengan warga tetap. Akibatnya, penyewa mengalami keterbatasan dalam memperoleh kabar terkait kegiatan komunitas, rapat warga, atau keputusan penting yang memengaruhi kehidupan sehari-hari di lingkungan tersebut. Ketimpangan ini menempatkan penyewa pada posisi yang tidak setara, baik dalam proses komunikasi maupun pengambilan keputusan, sehingga partisipasi mereka dalam kegiatan lingkungan menjadi rendah.

Menurut Treem dan Leonardi (2012) menekankan bahwa media komunikasi digital berperan penting dalam memperluas jaringan sosial dan memfasilitasi partisipasi warga, tetapi juga dapat menjadi sarana eksklusi jika akses tidak merata. Temuan ini selaras dengan Putnam (2000), yang menyatakan bahwa rendahnya modal sosial dan keterbatasan akses informasi mengurangi

keterlibatan warga dalam aktivitas komunitas dan ruang publik. Oleh karena itu, kesetaraan akses informasi menjadi prasyarat penting untuk mendorong partisipasi dan ekspresi demokratis di lingkungan perumahan.

2. *Gatekeeping*

Praktik *gatekeeping* di lingkungan perumahan modern menimbulkan hambatan signifikan terhadap kebebasan berpendapat, khususnya bagi penyewa. Aspirasi penyewa yang harus disalurkan melalui pemilik rumah atau pengurus formal menyebabkan proses penyampaian pendapat menjadi tidak langsung. Mekanisme ini berpotensi menimbulkan bias karena interpretasi atau seleksi informasi dapat memengaruhi pesan yang sampai ke pengurus atau komunitas, sehingga suara penyewa tidak sepenuhnya terdengar. Akibatnya, penyewa kehilangan ruang bicara mandiri untuk mengekspresikan pandangan, kebutuhan, atau kritik mereka secara terbuka, yang pada gilirannya melemahkan partisipasi mereka dalam kehidupan sosial perumahan.

Menurut Clegg (1989) menekankan bahwa struktur organisasi yang memediasi komunikasi dapat membatasi agen individu dalam menyampaikan aspirasi, sehingga kekuasaan informasi terkonsentrasi pada pihak tertentu. Temuan ini sejalan dengan Putnam (2000) yang menekankan pentingnya jaringan sosial dan akses komunikasi langsung



untuk membangun modal sosial dan partisipasi warga. Dengan demikian, *gatekeeping* tidak hanya membatasi akses informasi, tetapi juga menghambat terbentuknya dialog demokratis dalam komunitas perumahan.

3. Interaksi Sosial

Minimnya interaksi antara penyewa dan warga tetap di lingkungan perumahan modern berdampak signifikan terhadap terbentuknya ruang dialog sosial. Ketika komunikasi antarwarga terbatas, kesempatan untuk bertukar informasi, menyampaikan pendapat, atau membangun solidaritas komunitas menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan relasi sosial menjadi renggang dan interaksi yang seharusnya terbentuk secara alami mengalami hambatan. Akibatnya, keterlibatan warga dalam kegiatan komunal dan partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama menjadi rendah.

Putnam (2000) menekankan bahwa modal sosial tumbuh melalui interaksi rutin dan saling percaya antarwarga, yang kemudian mendorong partisipasi aktif dalam komunitas. Sementara itu, penelitian Low (2003) menunjukkan bahwa segregasi sosial, baik melalui status kepemilikan rumah maupun desain perumahan eksklusif, memperlemah jaringan sosial dan mengurangi peluang dialog antarwarga. Dengan demikian, minimnya interaksi sosial bukan hanya masalah komunikasi, tetapi juga

berdampak pada kapasitas warga untuk mengekspresikan pendapat dan berpartisipasi secara demokratis dalam lingkungan perumahan.

4. Desain Perumahan

Desain perumahan *cluster* yang bersifat eksklusif memiliki implikasi signifikan terhadap pola komunikasi dan hubungan sosial antarwarga. Penataan hunian yang menekankan batas fisik, seperti pagar, gerbang, dan sistem keamanan tertutup, cenderung membatasi terjadinya interaksi spontan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, ruang temu informal yang seharusnya menjadi medium pertukaran gagasan dan pembentukan kepercayaan sosial semakin berkurang. Kondisi ini berdampak pada melemahnya modal sosial, karena warga jarang memiliki kesempatan untuk membangun relasi di luar lingkaran sosial yang terbatas.

Menurut Low (2003) menunjukkan bahwa perumahan berpagar menciptakan segregasi sosial yang menghambat terbentuknya solidaritas komunal. Temuan serupa dikemukakan oleh Gehl (2011), yang menegaskan bahwa desain ruang hunian yang tidak ramah interaksi akan mengurangi intensitas komunikasi dan aktivitas sosial. Dalam jangka panjang, berkurangnya interaksi informal ini dapat menurunkan partisipasi warga dalam kehidupan komunitas serta



membatasi ruang kebebasan berpendapat di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika kebebasan berpendapat di Perumahan Pesona Bali dipengaruhi secara kuat oleh ketidakseimbangan akses informasi antara warga tetap dan penyewa. Ketidakseimbangan ini tercermin dari tidak dilibatkannya penyewa yang sebagian besar merupakan mahasiswa dalam grup WhatsApp utama perumahan, yang menjadi saluran komunikasi inti terkait informasi kegiatan dan keputusan lingkungan. Ketika penyewa berada di luar arus informasi utama, mereka berada pada posisi sosial dan komunikatif yang lebih lemah dibandingkan warga tetap. Situasi ini konsisten dengan temuan bahwa status kepemilikan rumah memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat *social capital* dan keterlibatan komunitas, di mana pemilik rumah menunjukkan tingkat partisipasi lebih tinggi karena dianggap memiliki komitmen jangka panjang terhadap lingkungan tempat tinggal (Akbar et al., 2023). Dengan demikian, pandangan warga tetap bahwa penyewa "tidak memiliki kepentingan jangka panjang" memperkuat struktur eksklusi yang sudah ada.

Dalam konteks hunian sewa, rendahnya *social capital* penyewa juga merupakan fenomena yang telah banyak ditemukan dalam studi perumahan.

Penghuni hunian sewa umumnya memiliki tingkat kepercayaan, interaksi sosial, dan partisipasi yang lebih rendah dibandingkan pemilik rumah (Rinawati et al., 2017). Kondisi ini terutama terjadi ketika sistem komunikasi komunitas tidak dirancang secara inklusif bagi seluruh kelompok penghuni. Ketika penyewa tidak memiliki akses langsung terhadap aliran informasi, maka kemampuan mereka untuk memahami isu, mengemukakan pendapat, serta terlibat dalam proses deliberatif menjadi sangat terbatas. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Anda yang menunjukkan bahwa mekanisme *gatekeeping* di mana penyewa harus menyampaikan aspirasinya melalui pemilik rumah tidak hanya menciptakan potensi distorsi pesan, tetapi juga mempersempit ruang bicara penyewa dalam komunitas.

Segregasi sosial juga memperkuat hambatan kebebasan berpendapat. Pola interaksi di Pesona Bali menunjukkan bahwa penyewa lebih banyak berinteraksi dengan kelompok internal mereka (sesama mahasiswa), sementara warga tetap membangun relasi sosial dalam lingkaran mereka sendiri. Pola segmentasi sosial semacam ini telah dijelaskan dalam penelitian hunian terjangkau di Jakarta, di mana penyewa cenderung memiliki tingkat keterikatan sosial yang lebih rendah karena dianggap "penghuni sementara" dan tidak memiliki kepemilikan simbolik terhadap ruang



tinggal ("The Interrelationships of Social Capital", 2020). Ketika relasi sosial tidak terbentuk secara alami, modal sosial horizontal yang menjadi dasar terbangunnya dialog dan partisipasi menjadi sulit berkembang. Hal ini menjelaskan mengapa penyewa di lokasi penelitian cenderung pasif, meskipun tidak ada pelarangan eksplisit terkait kebebasan berpendapat.

Selain faktor sosial, desain fisik perumahan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan modal sosial dan ruang dialog. Perumahan Pesona Bali menggunakan konsep hunian *cluster* yang cenderung eksklusif, dengan batasan fisik dan ruang interaksi yang terbatas. Desain ruang hunian memiliki dampak langsung terhadap frekuensi interaksi sosial antar penghuni; ruang yang lebih terbuka dan mudah diakses dapat memperkuat modal sosial, sementara ruang tertutup cenderung melemahkan interaksi spontan (Malik et al., 2023). Studi pada *gated community* di Makassar juga menegaskan bahwa desain perumahan tertutup tidak menjamin terbentuknya kohesi sosial (Rahayu et al., 2023). Faktor yang lebih menentukan adalah bagaimana komunitas mengelola ruang komunikasi, keterlibatan warga, serta akses penghuni terhadap saluran partisipasi.

Ketika seluruh temuan ini dipertemukan, terlihat bahwa hambatan terhadap kebebasan berpendapat di

Perumahan Pesona Bali tidak bersifat normatif atau berupa pelarangan langsung, melainkan struktural. Hambatan tersebut muncul dari interaksi antara eksklusivitas spasial, segmentasi sosial, dan sistem komunikasi yang tertutup. Penyewa tidak hanya kehilangan akses terhadap informasi, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan relasi sosial, memahami konteks isu, dan menyampaikan suara mereka secara setara. Dengan kata lain, kebebasan berpendapat tidak dapat terwujud dalam lingkungan yang tidak menyediakan ekosistem sosial dan komunikasi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembukaan akses informasi, penyusunan saluran komunikasi alternatif, serta kegiatan komunal yang menyatukan warga tetap dan penyewa sebagai langkah untuk membangun komunitas yang demokratis dan partisipatif.

D. Penutup

Penelitian ini menemukan bahwa dinamika kebebasan berpendapat di lingkungan Perumahan Pesona Bali sangat dipengaruhi oleh pengaturan komunikasi yang membedakan antara warga tetap dan penyewa. Kebijakan untuk tidak memasukkan penyewa ke dalam grup WhatsApp utama dimaksudkan untuk menjaga efektivitas komunikasi dan meminimalkan beban informasi yang dianggap tidak relevan



bagi penghuni sementara. Namun, meskipun bertujuan administratif, kebijakan ini secara tidak langsung menimbulkan ketimpangan akses informasi. Penyewa yang tidak memperoleh informasi secara langsung menjadi kurang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan komunal, sehingga partisipasi sosial mereka menurun. Media komunikasi digital memiliki peran strategis dalam membentuk jaringan sosial dan mendukung partisipasi warga, namun akses yang terbatas dapat menimbulkan eksklusi sosial. Keterbatasan akses informasi dan interaksi sosial yang tidak merata akan melemahkan modal sosial dan menurunkan partisipasi warga dalam kehidupan komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya desain komunikasi yang inklusif untuk memastikan kebebasan berpendapat dan keterlibatan demokratis bagi seluruh penghuni perumahan.

Secara keseluruhan, hambatan kebebasan berpendapat di lingkungan perumahan modern tidak muncul dari pelarangan formal atau niat sengaja membatasi aspirasi warga, melainkan lebih merupakan konsekuensi dari pengaturan komunikasi internal, dinamika sosial, dan karakteristik hunian itu sendiri. Desain fisik perumahan yang eksklusif, minimnya interaksi informal, serta praktik *gatekeeping* dalam distribusi informasi berkontribusi pada

ketidaksetaraan partisipasi antara warga tetap dan penyewa. Walaupun kebijakan komunikasi sering kali dimaksudkan untuk menjaga efisiensi dan relevansi informasi, implikasinya secara tidak langsung membatasi ruang dialog dan ekspresi individu.

Untuk meningkatkan partisipasi, perlu dikembangkan saluran komunikasi yang lebih inklusif, yang memungkinkan seluruh kelompok penghuni menerima informasi penting dan menyampaikan aspirasi mereka secara langsung, tanpa mengorbankan efisiensi. Bawa media komunikasi yang dirancang secara partisipatif dapat memperkuat jaringan sosial dan peningkatan modal sosial melalui interaksi yang lebih setara akan mendorong rasa memiliki, solidaritas, dan kualitas interaksi yang lebih baik. Dengan demikian, pendekatan komunikasi yang inklusif tidak hanya memperluas ruang kebebasan berpendapat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan partisipasi kolektif di lingkungan perumahan.

E. Daftar Pustaka

- Akbar, M., Hartono, D., & Aritenang, A. F. (2023). Does homeownership affect social capital? *Cities*, 134, 104210. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.104210>
- Authors omitted. (2010). Housing, social capital and community development in Seoul. *Cities*, 27(Supplement 1), S35–S42.



- <https://doi.org/10.1016/j.cities.2010.03.004>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
<https://doi.org/10.1177/1525822X08326257>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, 6(2), 80–88.
<https://doi.org/10.1177/1558689812437186>
- Dewi, R. C. P., Wiranegara, H. W., & Supriyatna, Y. (2024). The effect of neighborhood size on social cohesion in gated housing. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(2), 167–176.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v20i2.51996>
- Dewi, R., Wiranegara, H., & Supriyatna, A. (2024). Desain perumahan eksklusif dan kohesi sosial warga. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 35(1), 55–68.
- Gehl, J. (2011). *Life Between Buildings: Using Public Space*. Washington DC: Island Press.
<https://doi.org/10.5822/978-1-61091-189-9>
- Griffith University. (2024). Exploring the relationship between urban design and social capital: A systematic quantitative literature review. *Architecture*, 4(3), 493–514.
<https://doi.org/10.3390/architecture4030027>
- Griffith University. (2024). *Urban Design, Public Space, and Social Participation*. Griffith Centre for Social and Cultural Research.
- Guity-Zapata, N. A., Stone, W. M., & Nygaard, C. A. (2024). Secure renting by living collectively? A relational exploration of home and homemaking in rental housing cooperatives. *Journal of Housing and the Built Environment*, 39, 1355–1376. <https://doi.org/10.1007/s10901-024-10126-5>
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: Polity Press.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/6752.001.0001>
- Harefa, D. (2025). Getting To Know Yahowu And Ya'ahowu Warm Greetings From The Nias Community. *KOHESI : Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(2), 15–27.
<https://doi.org/10.57094/kohesi.v5i2.2559>
- Harefa, D. (2025). Globalizing Hombo Batu The Role Of English In Promoting Nias Local Wisdom On The International Stage. *Research on English Language Education*, 7(1), 74–91.
<https://doi.org/10.57094/relation.v7i1.2638>



Vol. 6 No. 2 Edisi September 2025

- Harefa, D. (2025). Hombo Batu A Traditional Art That Can Be Explained With The Laws Of Physics. *FAGURU: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan*, 4(1), 264-276. <https://doi.org/10.57094/faguru.v4i1.2459>
- Harefa, D. (2025). Integrating Character Education Into Science Learning To Improve Academic Achievement At Sma Teluk Dalam. *TUNAS : Jurnal Pendidikan Biologi*, 6(1), 1-13. <https://doi.org/10.57094/tunas.v6i1.2909>
- Harefa, D. (2025). Integration Of Modern Soil Science, Integrated Farming, And Nias Local Wisdom For Agricultural Productivity Improvement. *Jurnal Sapta Agrica*, 4(2), 13-25. <https://doi.org/10.57094/jsa.v4i2.3914>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781529716665>
- Low, S. (2003). *Behind the Gates: Life, Security, and the Pursuit of Happiness in Fortress America*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203975618>
- Malik, A., Akbar, R. F., Ramadhan, R. F., & Amalia, R. (2023). The influence of housing spatial design on social interaction in urban neighborhoods. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1201(1), 012015. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1201/1/012015>
- Prior, L. (2003). Using documents in social research. *Sociology*, 37(4), 821-828. <https://doi.org/10.1177/0038038503037001002>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>
- Rahayu, N., Ramli, R., & Muhammad, M. (2023). Tingkat kohesi sosial pada masyarakat di lingkungan gated community Kota Makassar. *Jurnal Sosialisasi*, 10(1), 59-67. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v10i1.41736>
- Rinawati, E., Sadewo, F. X. H., & Legowo, M. B. (2017). Modal sosial pada penghuni rumah sewa. *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(1), 46-54. <https://doi.org/10.55115/dilema.v32i1.130>
- Siregar, F., Tanaka, C., Marthin, A., Pembangunan, M. S., Arsitektur, S., Kebijakan, P., & Bandung, I. T. (2021). Konsep komunitas arsitektur perumahan real estate: Kaitannya dengan konsep neighborhood dan modal sosial. *Jurnal Arsitektur*, 11(1).
- Siregar, M., et al. (2021). Modal sosial dan partisipasi warga di perumahan berpagar. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 233-248.
- The Interrelationships of Social Capital, Housing Affordability, and Community Attachment in Jakarta. (2020). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 447(1), 012030. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012030>



Vol. 6 No. 2 Edisi September 2025

- Treem, J. W., & Leonardi, P. M. (2012). Social media use in organizations: Exploring the affordances of visibility, editability, persistence, and association. *Communication Yearbook*, 36, 143–189. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2012.01434.x>
- Yandi, P. (2015). Conflicts and segregation of housing cluster communities and its surrounding. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 75–88. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i2.68>
- Yandi, R. (2015). Interaksi sosial masyarakat di kawasan perumahan modern. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19(1), 45–58.

